

Peraturan Wali Kota Sawahlunto
Nomor 20 Tahun 2025
Tentang :

RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

Tahun 2026



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025**



SALINAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

28 AUG 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 20

Selain berpedoman terhadap prioritas Nasional, Pembangunan Kota Sawahlunto juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan pembangunan Nasional tema pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yaitu **“Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, berikut merupakan sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Dalam mendukung program RKP Tahun 2026, Kota Sawahlunto telah merencanakan beberapa program pendukung yang selaras dengan program yang ada di Kota Sawahlunto untuk Tahun 2026. Adapun dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 Dalam Mendukung Program Prioritas/ Unggulan RKP Tahun 2026

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
Program Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	881.862.400,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.400.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	87.085.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	369.100.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.980.800,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	401.386.930,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.113.477.300,00
Program Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	10.000.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	75.560.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	45.500.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.500.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	163.000.000,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	23.440.000,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.078.599.900,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	883.652.850,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	180.942.225,00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	142.816.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.170.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	570.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	610.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.335.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.245.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	15.125.000.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	17.519.800,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	65.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.000.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	504.000.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4.500.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.509.000.000,00
Program Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	35.226.000,00
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	34.000.000,00
		Program Penetapan Tanah Ulayat	30.000.000,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	12.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.170.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	37.920.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	495.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	375.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	541.000.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.000.000,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengelolaan Permuseuman	197.130.000,00
		Program Pemasaran Pariwisata	418.678.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	59.004.000,00
Program Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	6.198.245.552,00
		Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.875.970,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.194.947.573,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	270.316.849,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	65.000.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	20.000.000,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.622.241.720,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.117.500.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	147.976.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	1.159.630.000,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.825.460,00
		Program Penanganan Bencana (sosial)	64.257.100,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34.978.140,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	-
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	334.715.650,00
		Program Pencatatan Sipil	12.000.750,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	30.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.075.354.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.703.146.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	244.105.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	283.549.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	78.300.000,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
		Program Perlindungan Khusus Anak	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	1.397.633.565,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	12.126.300,00
Program Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.170.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	570.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	610.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.335.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.170.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	38.000.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	80.000.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85.000.000,00
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	234.956.160,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	303.697.375,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	372.522.500,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	4.566.175,00
		Program Pengembangan Ekspor	19.000.000,00
Program Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	586.368.384,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	223.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	147.976.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	1.159.630.000,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.825.460,00
		Program Penanganan Bencana (sosial)	64.257.100,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34.978.140,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.454.409.900,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	364.358.880,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
Program Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	401.386.930,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.113.477.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	47.326.450,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	11.777.350,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	881.862.400,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.400.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	87.085.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	369.100.000,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	341.850.420,00
	Urusan Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	70.664.984.602,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	351.812.903,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	523.324.923,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	1.651.220.660,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	399.475.000,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	144.325.000,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.454.409.900,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
Program Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.980.800,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	268.394.000,00

RKP 2026		RKPD 2026	
Prioritas Nasional	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Penanggulangan Bencana	424.709.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.000.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	504.000.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4.500.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.509.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	586.368.384,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	375.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	541.000.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.000.000,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	197.130.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	1.397.633.565,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	12.126.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	39.650.700,00
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	15.268.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	881.862.400,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.400.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	87.085.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	369.100.000,00

4.2.1.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 terdiri dari :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Pendidikan yang Merata dan Kesehatan yang Berkualitas
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Hijau Sumatera Barat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



RKPD | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO - TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO